PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang

OLEH:

JESSE STELLANI MOFU

2020/20043158

Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Padang

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)

Nama	**: Jesse Stellani Mofu**
NIM/TM	**: 20043158/2020**
Program Studi	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**

Padang, November 2024

Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Dosen Pembimbing,

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Judul	:	PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN (*Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)*
Nama	:	Jesse Stellani Mofu
NIM/TM	:	20043158/2020
Program Studi	:	Akuntansi
Keahlian	:	Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2024

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. .....
2.	Anggota	Vanica Serly, S.E., M.Si	2. .....
3.	Anggota	Halkadri, S.E, Ak, M.M	3. .....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Jesse Stellani Mofu
NIM/Tahun Masuk	: 20043158/2020
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar/18 Juli 2003
Program Studi	: S1 Akuntansi
Keahlian	: Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Alamat	: Jl. Nuri, Kabupaten Fakfak
No. HP	: 082238859216
Judul Skripsi	: Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari itm pembibing.
3. Pada karya tulisskripsi ini tidak terdapat karya/pendapat orang lain yang telah di tulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkana nama pegarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan etidakbenaran dalam penryataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2024

Yang Menyatakan,

Jesse Stellani Mofu

20043158

ABSTRAK

Jesse Stellani Mofu, (20043158). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)

Pembimbing : Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal (yang diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas) dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Papua periode 2021-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel selama tahun penelitian berjumlah 50 data, yang dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan kemandirian daerah dan efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, namun kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua periode 2021-2022.

Kata kunci: desentralisasi fiskal; kemandirian daerah; ketergantungan pada pemerintah pusat; efektivitas; kinerja pemerintah daerah; akuntabilitas pelaporan keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan penuh rasa syukur penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)".

Penulisan skripsi tidak terlepas dari lika-liku dan tantangan yang penulis hadapi. Namun, berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dr. Nelvirita, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) dan juga pembimbing skripsi. Banyak-banyak terimakasih penulis ucapkan kepada beliau karena telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar selama 4 tahun masa perkuliahan. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan berkah kesehatan dan rezeki yang melimpah.
5. Ibu Vanica Serly, S.E., M.Si dan bapak Halkadri Fitra, S.E, Ak, M.M selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselaikan semestinya.
6. Kepada seluruh staf dan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terlebih khusus di Departemen Akutansi. Terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga dapat penulis implementasikan di dunia kerja nanti. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah kesehatan dan rezeki yang melipah kepada semuanya.

7. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, bapak Festus Mofu dan ibu Karolina Tigtigweria. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, cinta dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita penulis. Semoga keduanya diberikan hikmat dan kesehatan sehingga kesuksesan dan hal baik kedepannya akan terus penulis perjuangkan untuk kalian berdua.

8. Kepada saudara-saudara penulis yang terkasih kaka Yudit Tira Robeka Mofu, kaka Gad Emerson Mofu, kaka Albert Rudi Yason Mofu, ade Christince Safira Mofu , ade Yoan Orpa Mofu, dan ade Queenza Amora Mofu terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis sejak kecil dan menjadi sumber semangat penulis dalam meraih cita-cita. Semoga kalian semua diberikan hikmat, kesehatan, dan kesuksesan.

9. Kepada Mama Tua, Kaka Suster, Kaka Seba, Kaka Riki, Kaka Ani Hana Dion. Terimakasih supportnya Tuhan Yesus Memberkati.
   pada sahabat tercinta yang penulis temui pada November 2020 Ria Anggraini Tuarita. 4 tahun melewati suka duka di tanah rantau Kota Padang dan menjadi sumber semangat serta mengajari penulis hal-hal baru membuat penulis bersyukur dan berterimakasih kepada Tuhan telah dipertemukan dengan beliau, banyak hal yang penulis ragukan namun selalu diyakinkan oleh Ria bahwa penulis bisa. Semoga Ria diberikan kesehatan, kesuksesan dan dikelilingi banyak orang baik kemanapun Ria melangkah.

10. Kepada adik tercinta Nurdini Patiran, terimakasih selalu memberikan semangat dan menjadi partner travelling di Sumatera Barat di kala suntuk pada masa perkuliahan, semoga Dini sehat selalu dan juga dimudahkan dalam menyusun tugas akhir.

11. Kepada sahabat penulis Fari Rahma. Terimakasih sudah menjadi teman sekamar, sudah sabar dan tulus mendampingi dan menyemangati penulis selama ini. terimakasih juga kepada keluarganya amak, ayah, ica, adi, ete, one, acik yang di Kayu Tanam sudah menyambut penulis dengan hangat. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.

12. Kepada teman-teman Republik Friends 2020, Ria, Yasin, Gilberth, Imor, Renaldi, Ical, Thelma Melan, Abraham, Tina, Susi, Acel. Terimakasih untuk sukaa duka dan cerita yang luarbiasa selama di Minangkabau. Tuhan Memberkati setiap langkah teman-teman semua.

13. Kepada HIMAPA SUMBAR, terimakasih telah menjadi rumah dan

memberikan wadah untuk menuangkan ide dan gagasan kepemimpinan. Semoga semakin solid kekeluargaannya. Tuhan Yesus Memberkati.

14. Kepada adek kost Wahidatun Nisa, terimakasih selalu menyemangati penulis dikala mengerjakan tugas-tugas kuliah. Semoga Nisa juga dimudahkan dalam kuliahnya.

15. Kepada anak-anak kost Cenli kamar Utara terimakasih sudah menerima dan berteman dengan Jesse di Kost. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu.

16. Kepada teman-teman kelas D Accounting. Terimakasih untuk suka duka masa perkuliahan selama 4 tahun. semoga kita semua sehat dan sukses selalu.

17. Kepada Ibu Kost lama Ibu Hermiyanti, terimakasih sudah menerima jesse di Kost. Semoga ibu sehat selalu.

18. Kepada teman-teman KKN Lolong Belanti dan Magang Dinas Perdagangan, semoga semuanya sukses dan sehat selalu.

19. Kepada seluruh keluarga, saudara, teman dan rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga semuanya sehat selalu dan dikelilingi hal-hal baik.

Penulis, November 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 13
A. Latar Belakang 13
B. Rumusan Masalah 22
C. Tujuan Penelitian 23
D. Manfaat Penelitian 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Kajian Teori 25
1. Teori Keagenan 25
2. Desentralisasi Fiskal 26
3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 35
4. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 38
B. Penelitian Relevan 41
C. Kerangka Pemikiran 50
D. Hipotesis Penelitian 51
1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 51
2. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 53
BAB III METODE PENELITIAN 55
A. Desain Penelitian 55
B. Populasi dan Sampel 55
1. Populasi 55
2. Sampel 55

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 56
1. Jenis Data 56
2. Sumber Data Penelitian 56
D. Teknik Pengumpulan Data 57
E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 57
1. Variabel Dependen 57
2. Variabel Independen 58
F. Teknik Analisis Data 61
1. Analisis Statistik Deskriptif 61
2. Uji Asumsi Klasik 62
3. Analisis Regresi Linier Berganda 64
4. Uji Hipotesis 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 67
B. Hasil Penelitian 69
1. Analisis Statistik Deskriptif 69
2. Uji Asumsi Klasik 75
3. Analisis Regresi Linier Berganda 81
4. Uji Hipotesis 83
C. Pembahasan Uji Hipotesis 87
1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 87
2. Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 89
3. Pengaruh Efektivitas Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 90
4. Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 92
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Keterbatasan Penelitian 95

C. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian yang Relevan 42
Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel 56
Tabel 3 Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 63
Tabel 4 *Purposive Samplling* 68
Tabel 5. Sampel Penelitian 68
Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif 70
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas 76
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas 77
Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas 79
Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi 81
Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 82
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 84
Tabel 13. Hasil Uji F 84
Tabel 14. Hasil Uji t 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Kemandirian Daerah (X1) 102
Lampiran 2 Nilai Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2) 103
Lampiran 3 Nilai Efektivitas (X3) 104
Lampiran 4 Nilai Kinerja Pemerintah Daerah (X4) 105
Lampiran 5 Nilai Akuntabilitas Publik (Y) 106
Lampiran 6 Tabulasi Data 107
Lampiran 7 Tabel Durbin Watsson 109

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik kini telah berkembang pesat yang dibuktikan dengan adanya era reformasi yang membuat negara pada dasarnya membutuhkan pemerintahan yang baik demi mewujudkan *good governance* (Yulia Trisaptya et.al, 2016).

Akuntabilitas merupakan ciri khas daripada sektor publik, dimana hal ini menjadi salah satu prinsip *good governance* yang saat ini menjadi sorotan. Demikian halnya dengan akuntabilitas publik dalam pemerintah daerah yang mencakup hal pemberian informasi terkait dengan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan. Dengan demikian, terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, khususnya pada reformasi keuangan. Adapun sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan ini berasal dari pada rakyat, sehingga pemerintah bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung pada rakyat dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan (Suryanto, 2017). Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya memiliki tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip relevan dan tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum (Suryanto, 2017).

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan

transparan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup proses penyusunan, pengauditan, dan penyampaian laporan keuangan yang mencerminkan dengan tepat penggunaan dan pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah (Fitri dan Khotimah, 2022). Adapun Akuntabilitas pelaporan keuangan ini menjadi penting karena organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menggunakan dana publik secara efisien dan bertanggung jawab (Suryanto, 2017) .

Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berperan dalam pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif (Martiningsih, 2009). Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah ini harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas (Steccolini, 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan baik pemerintah pusat ataupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal di pemerintah. Penyusunan dan pemeriksaan akan Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.dengan demikian, BPK RI yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah bertanggungjawab atas pemerikasaan laporan keuangan pemerintah tersebut. Pemberian opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas

misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017).Terdapat tiga katergori yang disajikan yaitu: 1. Opini, 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian opini audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK merupakan sebuah bentuk akuntabilitas, karena menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan bebas misrepresentasi material (Nurhidayati, 2017). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara menyatakan terdapat 4 jenis opini audit yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), serta opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Papua memiliki 42 kabupaten dan kota sampai pada tahun 2022 sebelum diresmikannya Daerah Otonom Baru pada Desember 2022. Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebayak sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan terakhir untuk LKPD 2022 sedangkan Pemerintah Papua telah mendapat delapan kali opini WTP atas LKPD tahun 2021 dan WDP atas LKPD tahun 2022.

Berdasarkan informasi dari website resmi BPK, meski mendapat opini WTP Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang menyatakan bahwa BPK masih menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan penyusunan anggaran belanja Pemprov Papua Barat yang belum dilakukan secara cermat, yaitu Anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan belum memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat kesalahan

penganggaran pada belanja barang dan jasa di 12 OPD dan belanja modal di 8 OPD. Kemudian, pengelolaan belanja hibah pemprov Papua Barat juga belum sesuai dengan ketentuan, dimana penetapan penerima hibah belum memperhatikan kriteria pemenuhan persyaratan. BPK juga menyoroti pelaksanaan paket belanja modal dan belanja barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan berupa kekurangan volume sebesar 47 paket pekerjaan senilai Rp12,22 miliar di 11 OPD dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 13 paket pekerjaan di 6 OPD.

Tahun 2022 terdapat 3 daerah di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong yang meski telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian namun mendapat teguran yang tegas ari BPK karena ketiga daerah tersebut diklaim masih memiliki problem pelaporan keuangan yang belum tuntas serta masih ada permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang serta ada dana yang belum jelas.

Pemerintah provinsi Papua pada tahun 2023 juga mendapatkan opini WDP atas LKPD tahun 2022 setelah delapan kali mendapat opini WTP. Hal tersebut diungkapkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi. Permasalahan tersebut rupanya terjadi dalam penyajian laporan keuangan, dimana terdapat anggaran realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk atas pelampauan realisasi belanja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan anggaran perubahan. Namun penetapan anggaran perubahan itu tidak melalui persetujuan DPRP dan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Akibat pelaksanaan dan substansi belanja yang tidak sepenuhya memenuhi kriteria. maka BPK tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap

pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemprov Papua 2022.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Papua terkait dengan akuntabilitas pelaporan keuangan , menunjukkan bahwa meskipun memperoleh opini WTP maupun WDP, tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Papua untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefenisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi karena untuk menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperlukan sumber pembiayaan yang memadai menurut Fontanella dan Rossieta (2014). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin,2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Syahrudin (2006) telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara seperti peningkatan tingkat pertumbuhan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Moisiu dalam Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa pemerintah lokal lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. Sejak berlakunya desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, maka dana transfer daerah kemudian

dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implementasi otonomi daerah akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan karena setiap daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia (Syahrudin, 2006). Adanya perbedaan kemampuan ini membuat pemerataan pembangunan menjadi kurang, ada pemerintah daerah yang mengalami kemajuan pesat dan ada juga yang justru mengalami kemunduran sehingga harus dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal menyebabkan terjadi aliran dana yang besar ke daerah dari pemerintah pusat (Syahrudin, 2006). Dengan kewenangan yang lebih besar melalui desentralisasi fiskal, maka daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya kepada publik, sehingga akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi alat penting untuk memastikan penggunaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan.

Mahsun (2014) mengusulkan bahwa efektivitas PAD dan kemandirian daerah adalah indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal, di mana PAD mengukur kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan mereka sendiri. Teori ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang rendah pada dana pusat menandakan kemandirian yang lebih baik dan desentralisasi fiskal yang efektif. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah dapat diukur dari kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin independen daerah tersebut dari transfer pusat, yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal

dalam penelitian ini diproksikan melalui 3 yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas. Kemandirian fiskal daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, semakin besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Adapun daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan desentralisasi fiskal yang belum optimal. Semakin rendah ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, semakin besar pula desentralisasi fiskal yang telah terjadi. Sementara efektivitas suatu daerah dilihat melalui Pendapatan asli daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki target anggaran dan realisasi tahunan dan berhasil mencapainya, maka pemerintah daerah tersebut dapat dianggap berhasil dan efektif..

Kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2016:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik maka Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparancy) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia.

Fontanella dan Rossieta (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja Pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami perbaikan . menurut PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Sehingga kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 guna melengkapi PP Nomor 6 Tahun 2008. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip pemerintahan yang baik *(good goverment governance).*

ELPPD Kemendagri yang merujuk pada peta kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pemerintah daerah berada pada tingkat rendah sampai sedang, sementara di bagian Timur Indonesia yaitu di Papua masih berada dalam kategori sedang sampai sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Papua seharusnya lebih dapat memaksimalkan kinerja daerahnya sehingga setidaknya dapat menjangkau kategori sedang. Dari data dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah daerah di Papua masih dikaratakan belum cukup baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah secara nasional tahun 2022 menempatkan Papua Barat pada status kinerja rendah dengan skor 2,14.

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik. dengan demikian, pemerintah daerah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain desentralisasi fiskal, dan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan pada fenomena yang ada, peneliti juga mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella dan Hilda Rossieta (2014) yang menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal dalam bentuk Tingkat Kemandirian Daerah dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Mudhofar dan Tahar (2016), menyatakan bahwa kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.; Penelitian yang dilakukan oleh Matilde dan Sari (2021) menyatakan bahwa jika kinerja pemerintah daerah meningkat akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa informasi dalam laporan keuangan menunjukan keuangan daerah dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang sedang berjalan diterima baik oleh masyarakat dalam hal membangun daerah yang sesuai dengan harapan publik sehingga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dan juga referensi penelitian terdahulu, peneliti masih menemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil pada peneltian terdahulu, dan juga terkait desentralisasi fiskal di Indonesia terus berkembang, dengan kewenangan fiskal yang lebih besar diberikan kepada daerah hal ini membawa implikasi penting bagi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, kemudian masih sedikit penelitian terkait akuntabilitas di wilayah Papua Barat, sehingga peneliti ingin menguji kembali terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
2. Bagaimana pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

4. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, baik pembaca maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah di Papua dalam menetapkan kebijakan terkait desentralisasi fiskal dan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.
2. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.

BAB V
PENUTUP

Pada BAB Penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Papua tahun 2021-2022 telah dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis statistik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal yang diproksikan oleh tiga variabel yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas, masing-masing tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada kabupaten/kota di Papua Tahun 2021-2022, sebagai berikut:
    i. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan..
    ii. Ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap.
    iii. Efektivitas PAD tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.
2. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada kabupaten/kota di Papua tahun 2021-2022.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mendapati beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

1. Banyak data ekstrem bernilai 0 dalam variabel desentralisasi fiskal untuk tahun 2021-2022 dalam penelitian yang membuat peneliti harus mengganti metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, adanya kriteria tertentu pada metode ini menyebabkan sampel penelitian kurang mampu menggeneralisasi populasi penelitian.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah hanya berpengaruh sebesar 19,1% terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua tahun 2021-2022. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat, regulasi keuangan, atau sistem pelaporan yang belum optimal bisa mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel ini dengan akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut peneliti memprediksi bahwa masih ada variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Mengembangkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

2. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Papua hendaknya dapat mengoptimalkan dana transfer dari pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode penelitian yang lain agar dapat menggeneralisasi populasi penelitian secara keseluruhan, dan dapat memperluas populasi penelitian menjadi beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi di Indonesia, atau meneliti seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mewakili akuntabilitas pelaporan keuangan seperti tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian internal, belanja modal, status daerah, atau komponen lain yang kemungkinan bisa mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyan[illegible] Sabanu, H. G., & Noor, F. (2018). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 21–42. https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10

Akbar, R. (2012). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi, 13, 32-34.

Ariyan[illegible] Y., Fitrijanti, T., & Rosdini, D. (2019). WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia : bagaimana meraih dan mempertahankannya. Proceeding of National Conference of Accounting, 1, 57–70. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art6

ASTUTIK, N. (2015). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009-2012)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNISSULA).

Azhari, F. F., & Muhtarom. (2024). Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dengan Kinerja sebagai Variabel Moderasi. Indonesian Accounting Literacy Journal, 4(2), 53 - 65. https://doi.org/10.35313/ialj.v4i2.5742

Bawono, A. D. B. (2015). The role of performance based budgeting in the Indonesian public sector (Doctoral dissertation, Department of Accounting and Corporate Governance, Faculty of Business and Economics, M (LP9/Red, 2022)acquarie University).

BPK Provinsi Papua Barat, 2023. *Papua Barat Terima Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut dari BPK.* Retrivied from https://papuabarat.bpk.go.id/papua-barat-terima-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk/

Changwony, F. K., & Paterson, A. S. (2019). Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. *The British Accounting Review*, *51*(5), 100834.

Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(12), 4153-4164. https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1519

Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, *10*(1), 1-12.

Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.

Friyani, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Goof Governance, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). Jurnal Sains Sosiohumaniora, 1(2), 142–148.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, E. F., Nurlela, L., Kartiko, E., & Fauziah, R. (2021). Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tanah Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi, 20(03), 42–47

Indriyani, I., & Pandansari, T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014 – 2016. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 2(1). https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.777

Kementrian Dalam Negeri, https://ppid.kemendagri.go.id, 28 Maret 2024

Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).

Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *3*(1), 44-54.

Kurniawan Dhani. 2010. Otonomi Daearah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Vol 7 No.2.

Lembaga Lensa Diklat Nasional. (Maret 2018). *Daftar Kabupaten dan kota di Papua Barat.* Retrieved from https://www.lediknas.com/daftar-kabupaten-kota-di-papua-barat/

Lie, C., Wardani, R. P., & Pikir, T. W. (2016). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Rencana Manajemen terhadap Opini Audit Going Concern. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1, No. 2(2), 84–105.

LP9/Red. (2022, Mei 17). *Raih WTP, 3 Kabupaten di Papua Barat dapat "Teguran' BPK*. Retrieved from linkpapua.com: https://linkpapua.com/raih-wtp-3-kabupaten-di-papua-barat-dapat-teguran-bpk/

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Mantika, S. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *4*(3), 598-604.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. ANDI.

Martiningsih Sri Pancawati, 2009, Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah, Makalah Simposium Nasional Akutansi (SNA) XII Palembang.

Moisiu, A. (2013). *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences.* pp.459-463

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17(2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.1 76-185

Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *12*(4). Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41597

Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, *6*(1), 1-17

Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(2), 236–253

Nurmuthmainnah, W. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. 21(1), 186–193.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(2), 102–108. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.488 4

Ramadhan, F., & Khoirunurrofik, K. (2024). AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14*(1), 33-45.

Sasana, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap pertumbuhan EkonomiDi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang.Jurnal Dinamika Pembangunan.

Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, 1–14.*

Sari, M. A. O. D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 186-193.

Sekaran, U. dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A SkillBuilding Approach. Sixth Edition.* John Wiley and Sons Lt.

Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms*, Dublin, September 2002.http://www.cergas.info

Subhan. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Keuangan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta

Suryanto, 2010. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Suryanto, L. N. U. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 5(1).

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.

Syahruddin, 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten. Skripsi, Universitas Andalas

Trisaptya, Y., Perdana, H. D., & Sulardi, S. (2016). EVALUASI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *16*(1), 75-86.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Vinda Erryana dan Hendri Setyawan. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Indonesia.Vol 5 No.1 Januari 2016.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523

Wijayanti, N., D. Fitriasari dan D. Setyaningrum. 2012. Analisis Kualitas Audit BPK dan Pengukuran Tingkat Ketaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia